

BAB II

IDENTITAS ETNIS CINA DALAM FILM

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum yang relevan dengan penelitian. Gambaran umum mengenai penelitian bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sesuai dengan penelitian yaitu tentang identitas etnis Cina dalam film.

2.1 Sejarah Perfilman Indonesia

Film pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda pada awal abad ke-20. Film Amerika banyak dijumpai pada masa itu melalui saluran TV di luar milik Belanda dan menguasai hampir seluruh bioskop di Jawa yang berjumlah 250 teater. Film Indonesia pertama yang diproduksi oleh Hindia-Belanda atau NV Java Film Company adalah *Loetoeng Kasaroeng* pada tahun 1926, yang dibintangi oleh aktor Indonesia dan terinspirasi dari cerita rakyat Parahyangan asal Sunda yang diproduksi tanpa suara (Aartsen, 2011). Kruger dan Heuveldrop sebagai sutradara asal Belanda yang memproduksi film *Loetoeng Kasaroeng* memilih pemeran yang berasal dari golongan priayi berpendidikan dan pribumi.

Produksi film di Indonesia pada masa kolonial didominasi oleh kaum Eropa dan China. Setelah kemunculan *Loetoeng Kasaroeng* sebagai film bisu pertama di Indonesia, Joshua dan Otniel Wong menciptakan film lokal berjudul *Melatie Van Java* atau *Lily Van Java* pada tahun 1929. Film ini juga belum memiliki suara dan kualitas teknis film tersebut sangat buruk sehingga tidak dapat bersaing dengan

film-film impor. Wong bersaudara kemudian berkolaborasi dengan sutradara asal Belanda bernama Albert Balink pada tahun 1937 dan menghasilkan film berjudul *Terang Boelan* atau *Full Moon* (Aartsen, 2011).

Perkembangan film di Indonesia mulai signifikan sejak zaman penjajahan Jepang karena produksi film mulai dilepaskan dari pihak Eropa dan China kepada masyarakat Indonesia. Para praktisi film di Indonesia mulai mempelajari teknik produksi film Jepang, penggunaan bahasa Indonesia dengan lebih jelas ditampilkan dalam film, sampai penggunaan film sebagai media penyampaian pesan sosial maupun politik. Setelah kemerdekaan Indonesia, lahir “Bapak Sinema Indonesia” yakni Umar Ismail dengan filmnya berjudul *Darah dan Doa* yang mengangkat isu nasional di dalamnya menjadi tanda kebangkitan dunia film di Indonesia, sehingga hari pertama pengambilan gambar *Darah dan Doa* yaitu pada 30 Maret 1950 diperingati sebagai Hari Film Nasional sekaligus didirikannya Perusahaan Film Nasional Indonesia (PERFINI) (Barker, 2010).

Kebangkitan film di Indonesia juga didukung oleh adanya Perseroan Artis Republik Indonesia (PERSARI) pada 23 April 1955 sebagai tempat dari para artis film maupun sandiwara yang dipimpin oleh Djamaluddin Malik. Ia juga mendirikan Festival Film Indonesia untuk mendukung produksi film lokal sekaligus Umar Ismail yang saat itu mengembangkan tradisi produksi film di Indonesia yang dimotivasi atas keinginan untuk mengekspresikan diri, tidak hanya untuk mencari keuntungan. Tradisi ini muncul sebagai kritik kepada para praktisi film asal China yang dianggap hanya untuk memenuhi selera masyarakat, sehingga film-film

komersil mendominasi film-film nasionalis-idealis sejak masa pra-kemerdekaan (Barker, 2010).

Film-film impor kembali memenuhi bioskop Indonesia pada tahun 1967 dan produksi film di Indonesia mulai kembali berkembang pada tahun 1970-an seiring pemulihan ekonomi Indonesia yang pesat. Tercatat bahwa produksi film di layar lebar bertambah sebanyak 103 film serta film-film impor mulai berkurang pada tahun 1974 sampai pada tahun 1798 karena adanya kebijakan sensor yang diperbaharui pada tahun 1977, di mana film-film yang menekankan kekerasan, seks, mengandung fasisme, kolonialisme, sosialisme, komunisme, dan imperialisme akan dilarang atau disensor. Selain itu, film-film yang membangkitkan sentimen agama, politik, suku, ras, dan golongan tertentu juga akan dilarang tayang. Pada periode ini, teknologi produksi film dan industri bioskop juga berkembang pesat (Aartsen, 2011).

Krisis ekonomi dan pemberontakan yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1990-an kembali memengaruhi industri perfilman di mana terjadi penurunan drastis pada produksi film lokal karena Sudwikatmono, sepupu Soeharto sekaligus pendiri Sinepleks 21 lebih menyukai pemutaran film-film Hollywood dibandingkan film-film produksi Indonesia, sehingga persaingan film lokal dengan asing kian menjadi ketat dan sulit (Hanan, 2008). Akibatnya, pada periode ini pembuatan film di Indonesia dalam setahun hanya berjumlah sekitar enam hingga sembilan judul saja.

Kebangkitan film di Indonesia sekali lagi terjadi pasca-Orde Baru setelah Soeharto turun dari kekuasaannya sebagai Presiden RI. Pada tahun 2003-2009,

produksi film meningkat pesat dari sebelas hingga 80 film, di mana jumlah ini terus meningkat terutama setelah kehidupan politik dan ekonomi mulai kembali tenang pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 (Wichelen, 2010:15). Film-film seperti *Petualangan Sherina* (2000), *Ada Apa Dengan Cinta* (2002), *GIE* (2005), *Laskar Pelangi* (2008), dan film produksi Indonesia lainnya mulai menguasai bioskop tanah air.

Hingga kini, film Indonesia telah mampu bersaing dengan film-film internasional yang dilihat dari banyaknya penghargaan internasional kepada film karya sineas Indonesia seperti film *Kucumbu Tubuh Indahku* (2018) yang berhasil mendapatkan tiga penghargaan yaitu International Cinephile Society Awards, Guadalajara International Film Festival, sampai Asia Pacific Screen Awards, kemudian film *Yuni* (2021) yang berhasil meraih penghargaan di Toronto International Film Festival (TIFF), dan film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* (2021) yang berhasil meraih penghargaan International Golden Leopard di Locarno International Film Festival dan berhasil ditayangkan pada Toronto International Film Festival 2021 (Syafira, 2023).

2.2 Jejak Etnis Cina di Indonesia

Kedatangan etnis Cina di Indonesia dimulai pada sekitar abad ke-11, dimana para imigran Tiongkok mulai mendatangi daerah Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan. Para pedagang Tiongkok kemudian menetap di Indonesia sejak sebelum Jayakarta dikuasai oleh pemerintah Hindia-Belanda Jan Pieterszoon Coen, khususnya di Banten dan beberapa daerah di luar Jawa. Jumlah pedagang Tiongkok

semakin berkembang di bawah pemerintahan Belanda karena mereka diberikan dukungan dan kepercayaan untuk bergerak di bidang perdagangan guna mewujudkan Batavia sebagai pusat perdagangan (Dahana, 2000).

Kedatangan etnis Cina ke Indonesia juga dicatat dalam perjalanan yang dilakukan oleh agamawan asal Tiongkok pada abad ke-14 bernama Fa Hsien. Melalui tulisannya tercatat bahwa Pulau Jawa menjadi salah satu tempat persinggahannya dalam perjalanannya menemukan tempat-tempat sakral. Perjalanan yang dimulai dari China dan diakhiri di Libanon ini kemudian disebut jalur sutra atau jalur perdagangan. Kegigihan orang Tiongkok dalam perdagangan membuat mereka melakukan perjalanan ke beberapa tempat, salah satunya Indonesia yang kemudian dijadikan tempat tinggal dan banyak diantaranya yang melakukan perkawinan campuran dengan orang Indonesia. Hasil perkawinan campuran inilah yang melahirkan istilah Indo-China atau disebut dengan etnis Cina (Yudha, 2020).

Kedatangan etnis Cina di Indonesia telah menghasilkan ragam seni, budaya, dan arsitektur sebagai bentuk akulturasi antara etnis Cina dan penduduk nusantara, terutama bidang perekonomian. Kesuksesan perniagaan etnis Cina terus berlangsung sehingga pada zaman kolonial, sehingga ada upaya adu domba yang dilakukan oleh VOC dan mengakibatkan terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Cina selama tiga hari dan dengan jumlah korban yang mencapai 60.000 masyarakat etnis Cina (Bakhtiar dkk., 2022)

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dianggap dengan sengaja memojokkan etnis Cina, sehingga terjadilah penyerangan dari warga Cina kepada pos-pos VOC di Jatinegara, Tanah Abang, Tangerang, dan sampai ke Benteng Batavia pada 07 Oktober 1940 yang mengakibatkan sebanyak 7.500 jiwa etnis Cina tewas. Peristiwa ini kemudian disebut juga dengan Geger Pecinan (Dharmowijono dalam Yudha, 2020).

Penerimaan terhadap etnis Cina perlahan mulai terjadi ketika para tokoh Cina berkontribusi dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasionalisme mulai terjadi karena adanya Rumah Perkumpulan Tionghoa atau *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yang mendukung orang Cina untuk mengenal identitasnya dan mendirikan sekolah-sekolah, yang kemudian menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga lahirlah Boedi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Dahana, 2000).

Peran serta etnis Cina dalam meraih kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar *Sin Po* juga berhasil mengobarkan semangat masyarakat Indonesia, dimana *Sin Po* juga mempelopori penggunaan kata “Indonesia” sebagai pengganti “Hindia dan Holland” untuk pertama kalinya. Penggunaan kata Indonesia sebagai sebutan sekaligus bahasa kemudian dijadikan pemersatu bangsa. Selain itu, identitas etnis Cina juga melebur menjadi etnis Cina-Indonesia yang bersatu dengan status warga negara Indonesia (Mahdiyar, 2023).

Identitas etnis Cina sebagai bagian dari suku di Indonesia kemudian dipertegas pada masa pemerintahan Ir. Soekarno yakni Maret 1963 dalam pidatonya di Kongres Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia), dimana ia menyatakan bahwa etnis Cina yang merupakan Cina Peranakan atau orang Cina kelahiran Indonesia yang berbahasa Indonesia merupakan orang Indonesia, sebaliknya orang Cina kelahiran Tiongkok yang berbahasa Cina bukan merupakan orang Indonesia (Bakhtiar dkk., 2022).

Identitas orang Cina kembali mengalami pergejolakan pada tahun 1965 ketika ada peristiwa G30-S/PKI dimana etnis Cina menjadi sasaran pembantaian karena dugaan sebagai bagian dari komunis, yang sebenarnya adalah upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno karena adanya dugaan Soekarno bekerja sama dengan PKI. Hal ini didasari dengan pendapat Soekarno bahwa ideologi Komunis tepat untuk menjaga ketertiban moral masyarakat Indonesia (Yudha, 2020).

Pergejolakan terus terjadi pada pemerintahan Soeharto dimana adanya upaya asimilasi inkorporasi terhadap etnis Cina untuk bergabung dengan penduduk asli, dimana ia menghapus secara perlahan tiga pilar budaya Cina, yaitu sekolah-sekolah menengah Cina, pers berbahasa Cina, dan organisasi-organisasi etnis Cina. Selain itu, Soeharto juga melarang adanya bentuk apapun dari Cina termasuk huruf dan perayaan Imlek. Hal ini dilakukan karena menurutnya warga Cina saat itu dikhawatirkan akan menyebarkan ideologi komunis di Indonesia (Yudha, 2020).

Para pebisnis Cina pada masa Orde Baru yang kekayaannya menguasai penjualan Tanah Air saat itu juga menjadi sasaran masyarakat dengan anggapan

bahwa para pebisnis Cina melakukan korupsi dan mendapat banyak perlakuan khusus dari pemerintah. Akibatnya, emosi masyarakat memuncak pada 12 Mei 1998 melalui peristiwa penjarahan dan upaya penggulingan Soeharto. Sentimen terhadap etnis Cina ini tergambar dari adanya kata-kata memaki pada tembok maupun kain, dan adanya tulisan-tulisan seperti “muslim” dan “milik pribumi” (Hutahaean, 2014).

Identitas etnis Cina kian membaik setelah Abdurrahman Wahid memerintah melalui konsep berbangsa yang sudah dimodifikasi. Konsep ini lebih jauh dijelaskan bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari pribumi dan non-pribumi, melainkan terdiri dari tiga ras, yaitu Cina, Melayu, dan Austro-Melanesia. Abdurrahman Wahid kemudian mengusung kebebasan terhadap etnis Cina dalam menjalankan adat istiadat serta ritual keagamaannya. Adapun upaya yang dilakukan Abdurrahman Wahid untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Cina yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut larangan yang berhubungan dengan adat dan istiadat etnis Cina (Dwivianto, 2016).

Upaya pembauran dan penerimaan terhadap etnis Cina terus berlanjut terutama pada masa pemerintahan Megawati yang berhasil mengesahkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keppres No. 19/2002. Tiga pilar etnis Cina kembali bangkit ketika Konghucu diakui sebagai salah satu agama di Indonesia, sehingga warga Cina tidak perlu “terpaksa” memeluk agama lain seperti yang terjadi pada masa Orde Baru (Yudha, 2020).

Hingga kini, identitas etnis Cina terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga menurut peraturan yang berlaku, warga etnis Cina sudah memiliki kebebasan sebagai Warga Negara Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial-budaya, politik, dan bidang lainnya. Namun, permasalahan yang terjadi kini hanya anggapan masyarakat yang secara turun temurun memiliki pandangan negatif tertentu terhadap etnis Cina, sehingga secara praktis, kebebasan yang tertuang dalam UU masih sulit untuk diinterpretasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Identitas Etnis Cina dalam Film

Pembentukan identitas etnis Cina di Indonesia memengaruhi kehidupan bermasyarakat baik bagi etnis Cina maupun etnis lainnya. Kedatangan Cina untuk berniaga dan menempati Indonesia membuat banyak budaya lokal dengan Tiongkok berakulturasi dan menghasilkan banyak bentuk budaya seperti arsitektur, seni, adat istiadat, dan sebagainya (Yudha, 2020). Akulturasi dan warga Cina yang mendiami beberapa tempat di Indonesia terutama daerah Sumatera membuat penduduk nusantara dapat bersaing dari segi ekonomi dan banyak diantaranya yang berhasil menjadi pedagang eceran untuk memenuhi kehidupannya.

Identitas etnis Cina sebagai penyokong perekonomian dan membantu meraih kemerdekaan kian luntur ketika pemerintahan Kolonial Belanda menempatkan orang Cina pada kelas Timur Asing sehingga memberikan pandangan bahwa orang Cina bukan penduduk Indonesia dan merupakan orang

asing. Sentimen negatif dari masyarakat terus meningkat dan mencapai puncaknya pada rezim Orde Baru lantaran adanya dugaan perlakuan khusus dari pemerintah dan kekhawatiran akan mendominasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang mengalami resesi (Hutahean, 2014).

Identitas etnis Cina sebagai warga asing dan dianggap akan mendominasi perekonomian Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan film di Indonesia yang saat itu menurun drastis karena tidak mampu bersaing dengan film asing yang dapat dikatakan mendominasi bioskop-bioskop di Indonesia (Hanan, 2008). Soeharto bersama dengan saudaranya membuka pintu bagi film-film Hollywood untuk tayang dan menggeser film produksi dalam negeri.

Kebangkitan film di Indonesia kembali terjadi setelah rezim Orde Baru selesai, dan pada saat itu pula muncul film bertema etnis Cina berjudul *Ca Bau Kan* yang rilis pada tahun 2002. Film *Ca Bau Kan* sempat menjadi kontroversi karena judulnya berbahasa Hokkian yang tidak diperbolehkan pada masa Orde Baru yang menggunakan etnis Cina sebagai tokoh utama dan mengangkat cerita Cina peranakan pada zaman Kolonial Belanda, penjajahan Jepang, hingga pada masa awal kemerdekaan Indonesia (Sutandio dan Arifin, 2022). *Ca Bau Kan* dalam bahasa Indonesia berarti gundik atau wanita simpanan orang Cina.

Secara historis, orang Cina telah berkontribusi dalam perkembangan film di Indonesia melalui karya-karya sineas pada zaman Kolonial Belanda, salah satunya adalah Wong bersaudara. Namun, film karya sineas asal Cina ini tidak mengangkat tema etnis Cina, melainkan kisah romansa masyarakat pribumi seperti *Lily Van*

Java dan Terang Boelan. Produksi film setelah memasuki penjajahan Jepang langsung diserahkan kepada sineas nusantara, sehingga warga Timur Asing tidak banyak berkontribusi pada film produksi dalam negeri (Aartsen, 2011).

Film bertema etnis Cina yang ada di Indonesia setelah rezim Orde Baru kemudian digarap oleh sutradara yang bukan berasal dari etnis Cina, seperti Nia Dinata yang merupakan perempuan berdarah Minang dan Sunda, Sammaria Simanjuntak yaitu perempuan berdarah Batak, dan Rano Karno yang merupakan keturunan Jawa dan Minangkabau. Film sekaligus naskah terpuji produksi sineas Indonesia berdarah Cina ada pada tahun 2016 yaitu *Cek Toko Sebelah* yang mengangkat tentang etnis Cina (Asih, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa film tentang etnis Cina dilihat dari sudut pandang orang diluar etnis Cina.

Penggambaran etnis Cina di dalam film ditunjukkan alur cerita yang mengangkat peristiwa Orde Baru dan perlakuan diskriminasi maupun stereotip terhadap etnis Cina seperti *GIE* (2005), *Merry Riana* (2014), *Ngenest* (2015), dan *Cek Toko Sebelah* (2016) (Susanto, 2017). Pada keempat film tersebut, etnis Cina diposisikan sebagai korban diskriminasi yang terjadi dan kisah perjuangan para tokoh untuk meraih impiannya maupun memperoleh keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.